DARI DISKURSUS ALTERNATIF MENUJU INDIGENEOUSASI ILMU SOSIAL INDONESIA: TEORITISASI ‘PROPHETIC POLITICAL EDUCATION’

NASIWAN & GRENDI HENDRASTOMO

Dosen Fakultas Ilmu Sosial UNY
e-mail: iwan1.uny@yahoo.com/ghendrastomo@uny.ac.id

Abstrak


Solusi yang dapat ditawarkan untuk menghadapi kondisi tersebut ialah pentingnya ikhtiar untuk membangun suatu diskursus alternative Ilmu-Ilmu Sosial, di luar arus besar diskursus Ilmu-Ilmu sosial Barat. Dari diskursus alternatif inilah kemudian muncul berbagai gagasan kritis tentang pentingnya melakukan indigenousasi Ilmu-Ilmu Sosial, salah satunya, muncul gagasan pentingnya Ilmu Sosial Profetik (ISP).

Langkah strategis berikutnya adalah bagaimana menurunkan gagasan Indigenousisasi, Ilmu Sosial Profetik, pada tataran yang lebih institusional dan kurikulum, praxis. Tulisan ini berusaha untuk memberikan kontribusi pemikiran atau semacam konsepsi tentang urgensi Prophetic Political Education sebagai bagian dari langkah untuk melahirkan perspektif teoritis yang sesuai dengan konteks kel Indonesia serta berusaha keluar dari dominasi perspektif teori-teori Barat atau Eropa sentris.

Kata-kata kunci: Pendidikan Profetik, Indigenousisasi, Ilmu Sosial
FROM ALTERNATIVE DISCOURSE ON THE MOVE TO SOCIAL SCIENCE INDIGENIZATION OF INDONESIA: THEORIZING ‘PROPHETIC POLITICAL EDUCATION’

NASIWAN & GRENDI HENDRASTOMO
Lecturers at Faculty of Social Sciences, YSU
E-mail: iwan1uny@yahoo.com/ghendrastomo@uny.ac.id

Abstract

The development of Social Sciences in Asia including in Indonesia for a long time has been influenced, dominated and adopted the social sciences that developed in Europe or America. Such a condition has been going on for a very long time more than a century, long before Indonesia’s independence in 1945. This condition has invited several intellectuals in Asia and Indonesia to question as well as find a way out, a poor condition concerning the social sciences, weakness and dependent (captive mind) on Western social sciences.

The solution offered to overcome these problems is the importance of an effort to build an alternative discourse of Social Sciences, outside mainstream discourse of Western social sciences. From these alternative discourses then appeared critical ideas about the importance of doing Indigenization of Social Sciences, one of them, is an idea about the importance of Prophetic Social Sciences (ISP).

The next strategic step is how to lose the idea of Indigenization, Prophetic Social Sciences, on a deeper level institutional and curriculum, praxis. This paper seeks to contribute to some sort of thought or conception of urgency Prophetic Political Education as part of measures to deliver theoretical perspectives in the context of Indonesian and trying to get out of the dominance of Western theories perspective or European centric.

Key words: Education Prophetic, Indigenousasi, Social Sciences
"Mengenai perkembangan ilmu ilmu sosial sebagai ilmu...betapa sedikitnya buku-buku atau karangan-karangan dalam bahasa Indonesia yang secara murni menambah atau mungkin mengubah teori-teori yang sampai sekarang dikenal". (Prof. Dr. Selow Sumardjan).

"Persoalan serius yang dihadapi oleh ilmuwan sosial di Indonesia adalah bagaimana menghadirkan ilmu sosial yang mampu untuk melakukan transformasi? Mengapa perlu memfokuskan pada pertanyaan ini. Hal ini dikarenakan ilmu sosial pada dekade ini masih mengalami kemandekan. Ilmu sosial yang dibutuhkan adalah bukan hanya mampu menjelaskan fenomena sosial, namun juga memtransformasikan fenomena sosial tersebut, memberi petunjuk kearah mana transformasi dilakukan, untuk apa dan oleh siapa?" (Prof. Dr. Kuntowijoyo).

"Memang pendidikan 'tarbiyah' bukanlah segala-galanya tetapi segalanya takkan bisa diraih kecuali melalui pendidikan 'tarbiyah'".

Pendahuluan

Diskusi tentang pentingnya membangun suatu diskursus alternatif ilmu-ilmu sosial di Indonesia, memiliki makna strategis bagi perkembangan ilmu-ilmu sosial di Indonesia. Hal tersebut sangatlah mendesak untuk dilakukan oleh para ilmuwan Indonesia dikarenakan adanya kenyataan bahwa perkembangan ilmu-ilmu sosial di Indonesia setelah sebentar abad berjalan masih memiliki ketergantungan akademis yang sangat tinggi dengan ilmu-ilmu sosial di Eropa atau Barat. Melalui ikhtiar untuk melahirkan diskursus alternatif dimungkinkan adanya langkah yang lebih elaboratif untuk melakukan indigenousasi ilmu-ilmu sosial di berbagai bidang kelimuan.

Forum Seminar Nasional yang diadakan oleh Fakultas Ilmu Sosial UNY, dengan tema besar "Indigenousasi Ilmu Sosial dan Implementasinya dalam Pendidikan Ilmu Sosial di Indonesia"; memberikan momentum yang baik untuk memikirkan secara lebih serius, komprehensif dan lebih elaboratif berkaitan dengan diskursus alternatif dan indigenousasi Ilmu-Ilmu Sosial di Indonesia pada khususnya. Hal tersebut dimungkinkan karena dalam forum ini diharapkan dapat mempertemukan berbagai pihak yang memiliki perhatian serius pada tema tersebut, yakni dari kalangan ahli, para guru besar yang menggeluti ilmu sosial, para dosen, dan para praktisi (guru SD, SMP, SMA) yang seharian hari berkehidupan dalam kegiatan pembelajaran ilmu-ilmu Sosial.

Pembahasan

Perkembangan dan Problematika Ilmu-ilmu Sosial

Kutipan pada awal tulisan ini dari seorang ilmuwan kenamaan Indonesia Selow Soemardjan, menegaskan kegelisahannya tentang perkembangan ilmu-ilmu sosial di Indonesia yang sangat memprihatinkan, karena sangat minim (untuk tidak mengatakan nihil) kontribusi ilmuwan sosial Indonesia dalam melahirkan teori-teori sosial yang sesuai dengan konteks keindonesiaan. Kegelisahan intelektual tersebut sudah diteriakkan oleh Selo
Soemardjan 22 tahun yang lalu pada suatu forum akademis yang prestisius di Yogyakarta. Kegelisahan intelektual-keilmuan dari Selo Soemardjan hingga hari ini masih tetap relevan untuk di-jawab oleh kaum terpelajar Indonesia, karena sampai hari ini belum ada jawaban serius secara akademik yang komprehensif-elaboratif.

Dengan nada yang hampir sama seorang Cendekiawan Muslim Indonesia, Kuntowijoyo, juga memberikan kritik yang tajam tentang perkembangan Ilmu Sosial di Indonesia. Dalam pandangannya Ilmu Sosial di Indonesia mengalami proses kemandegan bahkan kehilangan kerangka nilai yang mampu mengarahkan keman transformasi masyarakat di Indonesia digerakkan. Dalam kaitan ini untuk memperbaiki kondisi ilmu-ilmu sosial di Indonesia Kuntowijoyo mengusulkan perlunya memberikan ruang untuk hadirnya apa yang disebut dengan Ilmu Sosial Profetik (ISP).

Dalam ruang lingkup yang lebih luas menghadapi kemandegan Ilmu-ilmu Sosial di Asia, sejumlah intelektual Muslim di berbagai negara memiliki kegelisahan yang sama untuk menghadirkan ilmu sosial yang dapat langsung diterapkan dalam menjelaskan masyarakat Muslim. Pada dekade 1970-an, Ismail Raji Al-Faruqi menge-ukukan idenya mengenai Islamisasi ilmu-ilmu sosial kontemporer. Untuk mencapai tujuannya itu, Al-Faruqi mendirikan The Association of Muslim Social Scientists dan menjadi ketua umumnya antara 1972-1978, kemudian berpartisipasi aktif dalam lembaga internasional The International Institute of Islamic Thought (IIIT). Langkah Al-Faruqi menggagas mengenai islamisasi ilmu-ilmu sosial itu menjadi terob-
captive mind sebagai cara membaca perkembangan ilmu sosial di Dunia Ketiga. Menurut teori captive mind bahwa ilmu sosial Nusantara (Indonesia) menjadi korban orientalisme dan Eurosentrisme yang dicirikan oleh cara berpikir yang didominasi pemikiran Barat dengan cara meniru dan bersikap tak kritis. Peniruan yang tidak kritis tersebut merasuk ke semua tingkatan aktivitas ilmiah, memengaruhi latar masalah, analisis, abstraksi, generalisasi, konseptualisasi, deskripsi, eksplanasi dan interpretasi. Teori ini dikembangkan bersesuaian dengan pola penyebaran konsumsi di Dunia Ketiga, begitu juga dengan pola imperialisme akademik yang berlangsung di Indonesia.

Berkaitan dengan pengingginya ditumbuhkan sikap kritis, kiranya perlu dicatat bahwa ilmu sosial Barat tentu lahir dan berkembang dari struktur dan sistem sosial serta pranata sosial yang berbeda dengan masyarakat Indonesia, bahkan para orientalis membaca Timur menurut kategori dan perspektif Barat. Intelektual-akademisi Nusantara terpesona dengan perkembangan ilmu-ilmu sosial Barat, bahkan isu-isu dan masalah yang menjadi topik kajian para intelektual Barat juga menjadi topik yang ditiru oleh intelektual kita, tanpa memiliki dasar pijakan empiris yang kuat. Keadaan itu terus berlangsung, bahkan setelah lebih dari satu abad ilmu-ilmu sosial berkembang di Nusantara, hingga kini belum ada teori-teori sosial yang dihasilkan oleh intelektual kita dalam rangka menjelaskan kehidupan sosial masyarakat secara memadai. Keadaan ini menunjukkan disebabkan karena rendahnya penghargaan sesama intelektual Nusantara dalam menghargai ide dan gagasan diantara mereka, atau tradisi kutip-mengutip di antara mereka, sehingga ilmu sosial Nusantara tidak pernah mengalami perkembangan, bahkan mereka yang selesail belajar di Barat dengan sangat bangga dan hebat meniru-niru dan mengulang-ulang apa yang mereka pelajari di Barat tersebut, tidak muncul kesadaran kritis untuk merumuskan teori-teori sosial yang orisinal dan khas Nusantara.

Kandatipun semangat meniru begitu kuat, namun masih ditemukan sejumlah sarjana kita yang konsisten mengembangkan ilmu sosial yang khas, kepada mereka itu kita harus memberi apresiasi yang tinggi. Usaha mengembangkan ilmu sosial alternatif seperti yang pernah dilakukan Kuntowijoyo dengan Ilmu Sosial Profetiknya, bisa menjadi pilihan pengembangan ilmu sosial Nusantara. Sebab kalau hanya meniru dari Barat tentu bisa dinyatakan bahwa teori-teori sosial Barat tersebut merupakan teori yang tercerai dengan realitas, tidak memiliki dasar pijakan pada realitas masyarakat. Sarjana Nusantara lain seperti Soejatmoko pernah mengkritik teoritisasi masyarakat Jawa yang dilakukan oleh sarjana Barat, padahal watak dan tradisi masyarakat Nusantara merupakan yang khas, berbeda dengan elemen-elemen yang membentuk tradisi masyarakat Barat.

Perkembangan ilmu-ilmu sosial di Indonesia tidak lepas dari pengaruh perkembangan ilmu sosial yang ada di barat. Selama ini dikotomi barat dan timur menjadi salah satu hal yang menyebabkan perkembangan ilmu sosial di Indonesia terkesan didominasi pemikiran barat. Barat selalu dipersisikan sebagai sumber pengetahuan sedangkan timur sebagai pengguna ilmu pengetahuan itu yang secara ti-
dak sadar didoktrin oleh dunia barat. Sangat jarang bahkan hampir tidak ada pemikiran orisinil ilmu sosial yang bersumber dari ranah timur, khususnya dari Indonesia. Asia secara umum yang dipерsepsi sebagai bagian dunia timur yang dipерsepsi selalu terbela kang dan tertekan oleh dominasi pemikiran barat sehingga sangat jarang pikiran teori yang dihasilkan oleh pemikir dari timur. Selama ini hanya Cina, India dan Korea yang memiliki kontribusi terhadap perkembangan keilmu wan di Asia.

Kritikan terhadap perkembangan ilmu sosial di Asia muncul dari diskurus-diskursus alternatif. Beberapa pemikiran barat yang menjadi sumber kritikan seperti tinjauan orientalisme, eurorsentrisme, the captive mind, imperialisme akademik dan keberga tungan akademik yang menyerukan perannya diskursus alternative yang membebaskan. Kritikan tersebut menjadi salah satu pemicu untuk secepatnya menemukan diskursus alternative pemikiran ilmu sosial yang muncul dari negara-negara dunia ketiga.


Ilmu sosial di Indonesia terkesan juga lebih condong pada pemikiran barat. Ketidaktepatan teori yang ada di barat untuk membaca realita dan fenomena yang ada di Indonesia turut andil dalam menambah ketidakmampuan untuk menyelesaikan suatu masalah. Akademisi di Indonesia terkesan hanya mengambil tanpa melihat apakah teori yang diambil pas untuk diterapkan di Indonesia. Sehingga tidak mengherankan apabila selama ini banyak permasalahan yang mendera negara-negara di Asia tidak mampu ditentaskan secara tuntas, bukan karena ketidak mampuan ahli dan akademisi di negara asia, tetapi lebih pada kesalahan pembacaan masalah akibat ketidaktepatan alat analisis yang dalam hal ini berupa teori. Ironisnya pemilih an topic riset dan prioritas wilayah riset pun mendapat arahan dari lembaga-lembaga ilmu sosial barat.

Diskursus yang berkembang selama ini menunjukkan adanya hegemoni pemikiran barat terhadap timur yang mana bagi akademisi di Asia ingin menghentikan hegemoni ini dan memunculkan pemikiran alternative. Dalam posisi ini akademisi di Asia ingin bersanding sejajar dengan pemikiran pemikiran barat. Di Indonesia sendiri diskursus mengenai pengembangan teori ilmu sosial baru mulai banyak dipercipang. Mulai muncul pemikiran pemikiran yang berasal dan muncul dalam membaca dan menganalisis permasalahan yang ada di Indonesia. Sebagai contoh pemikiran Kuntowijoyo tentang Ilmu Sosial profetik mencoba untuk membuka pengembangan ilmu sosial di Indonesia dengan mencoba menggabungkan antara ilmu sosial dengan nilai-nilai transenden tal yang menjadi salah satu kekhasan budaya Indonesia atau pemikiran Selo Sumarjan tentang perubahan sosial dan masyarakat jejaring bisa menjadi contoh mulai munculnya ilmu-ilmu
sosial yang dikembangkan akademisi lokal.


Dari berbagai diskursus tersebut menarik untuk kemudian menelisik sejauh mana perkembangan ilmu sosial yang ada di Indonesia, sehingga nantinya dapat dipetakan secara jelas ilmu sosial lokal yang dikembangkan oleh tokoh akademisi Indonesia asli, dan bagaimana pula perkembangan ilmu sosial yang dikembangkan sebagai bagian dari mimpi melokalkan (indigenisasi) ilmu sosial dalam kacamata lokal.

Diskursus Teori Ilmu Sosial
A. Discourse Analysis

Discourse diambil dari bahasa latin diskursus yang kemudian diartikan sebagai diskusi, wacana yang berkembang di dunia bahasa (text). Dalam critical discourse analysis (CDA) discourse diartikan sebagai bahasa yang digunakan dalam interaksi sosial. Dengan kata lain discourse merupakan usaha untuk merepresentasikan dan mengkonstruksikan kembali dunia sosial.

Dalam kajian ilmu sosial, (sosiologi) wacana lazim diartikan sebagai pelbagai bentuk interaksi yang diucapkan (spoken interaction), baik formal maupun informal, dan pelbagai jenis teks tertulis (written text) yang terdapat dalam berbagai maklumat (seperti gambar). Karena kedekatannya dan mempersoalkan tentang makna text inilah terkadang analisis ini kemudian menjadi bias bahasa, padahal dalam dunia ilmu sosial kajian ini menjadi sangat berguna untuk memetakan, khususnya dalam hal ini mengkaji struktur perkembangan ilmu sosial. Secara umum, ilmu sosial tidak membahas wacana perse (struktur kalimat), tetapi lebih memperhatikan masalah tindakan sosial atau jalinan hubungan sosial yang terendap dalam spoken interaction and written text tersebut.

Analisis wacana (atau yang juga disebut analisis wacana kritis) adalah pendekatan yang relative baru dari sistematis pengetahuan yang timbul dari tradisi teori sosial dan analisis linguistik yang kritis. Dalam ranah ke-
bahasaan ciri dari analisis wacana (discourse analysis) antara lain:

1. Analisis wacana bersifat interpretative pragmatis, baik bentuk bahasanya maupun maksudnya (form and notion).

2. Analisis wacana banyak bergantung pada interpretasi terhadap konteks dan pengetahuan yang luas (interpretation of world).

3. Semua unsur yang terkandung di dalam wacana dianalisis sebagai suatu rangkaian.

4. Wujud bahasa dalam wacana itu lebih jelas karena didukung oleh situasi yang tepat (All material used in real that is actually having occurred in appropriate situational).

5. Khusus untuk wacana dialog, kegiatan analisis terutama berkaitan dengan pertanyaan, jawaban, kesempatan berbicara, penggalan percakapan, dan lain-lain.

Dari ciri-ciri tersebut tampaknya analisis wacana kemudian disadur dan dikembangkan untuk kepentingan yang lebih luas dan umum termasuk pada akhirnya analisis wacana berkembang di ranah ilmu sosial (sosiologi) sebagai salah satu bentuk analisis baru yang dikembangkan. Diskusi yang kemudian dikembangkan dalam diskursus ilmu sosial lebih pada memotret perbedaan dan penggunaan teori ilmu sosial yang diterapkan dan ‘dipaskan’ dalam memotret masalah sosial yang ada melalui struktur text yang muncul dari berbagai paradigma, artikel, gaganan dan ide yang telah dikembangkan terlebih dulu.

Analisis wacana yang dikembangkan dalam ilmu sosial sedikitnya memiliki tiga ciri

1. Pengetahuan tersebut diperoleh dari khasanah yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, atau bukan produk derivasi dari teori-teori besar (grand theories). Pengetahuan tersebut juga bukan semata-mata produk ‘akal sehat’ ilmuwan yang kemudian dicariakan alasan-alasan pembentuk (derivative), tetapi sebuah pengetahuan yang diyakini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup dan kehidupan nyata dalam masyarakat.

2. Pengetahuan tersebut tidak bebas nilai (sebagaimana lazim dibayangkan oleh para pendukung positivisme), tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan (inherent part) dan dipengaruhi oleh struktur sosial dan interaksi sosial.

3. Pengetahuan tersebut tidak terpisahkan dari kepentingan dan keberpihakan ilmuwan yang melakukannya analisis. Pengetahuan tersebut dapat dikatakan (suka apa tidak suka) sebagai produk dialog intensif antara apa yang dipikirkan oleh ilmuwan dengan kondisi empirik yang berada dalam kehidupan nyata (di lapangan).

Pengetahuan dalam analisis wacana menghasilkan klaim interpretif dengan memandang pada efek kekuasaan dari wacana dalam kelompok-kelompok orang, tanpa klaim yang dapat digeneralisasikan pada konteks lain. Dasar teoritis untuk analisis wacana didasarkan pada beberapa perkembangan sejarah dalam filsafat, ilmu pengetahuan, dan teori sosial. Sebagai suatu pendekatan pada analisis yang sistematis dalam pembentukan pengetahuan (wacana), analisis wacana pun tidak dipungkiri juga mengambil bagian dari beberapa tradisi pemikiran barat. Tradisi ini banyak dipengaruhi perkembangan analisis Foucaultian. Dalam pandangan Foucault diskur-
sus atau wacana adalah elemen taktis yang beroperasi dalam kancah relasi kekuasaan. Wacana adalah alat bagi kepentingan kekuasaan, hegemoni, dominasi budaya dan ilmu pengetahuan. Suatu dominasi atau hegemoni tertentu menggunakan wacana sebagai 'elemen taktis' untuk mempengaruhi pola pikir masyarakat, ini semua terkait dengan pembangunan sebuah dominasi dan pelestarian kekuasaan.

Akibat dari konteks dominasi budaya dalam diskursus ilmu sosial, pengetahuan yang dihasilkan melalui analisis wacana, selalu debatable (bisa diperdebatkan) dan acapkali membuka wacana-wacana baru yang terus berkesinambungan sehingga tidak mengherankan apabila apa yang disampaikan dan menjadi gagasan dari Fistrans Institute ini akan banyak mendapatkan respon dan mengubah beberapa kalangan untuk 'urun rembug' sekafigus juga beroposisi dengan gagasan ini.

B. Hegemoni Teori Sosial Barat


Relasi antara timur dan barat beroperasi berdasarkan model ideology yang dalam pandangan Gramsci sebagai Hegemoni, suatu pandangan bahwa gagasan tertentu lebih berpengaruh dari gagasan lain, sehingga kebudayaan tertentu lebih dominan dari kebudayaan lain. Dalam konteks ini ada dominasi gagasan barat terutama dalam ilmu sosial terhadap pemikiran gagasan dunia timur.

Masyarakat Intelektual Indonesia diposisikan sebagai konsumen yang selalu membeli teori-teori pemikiran dari dunia barat yang terkadang tidak sesuai dengan kajian masyarakat di negara dunia ketiga. Hegemoni teori sosial barat menjadi suatu keniscayaan karena perkembangan pengetahuan barat yang maju beberapa langkah dibanding perkembangan keilmuan di dunia ketiga.

Perkembangan tersebut menurut Farid Alatas, sebagai akibat lang-sung dari perkembangan teknologi informasi serta dorongan kuat untuk mengembangkan ilmu-ilmu sosial di Barat, akibat perkembangan itu dipandang sebagai fenomena Barat. Ilmu-ilmu sosial yang berkembang dan dipelajari di lembaga pendidikan (kampus) di Indonesia, termasuk juga negara-negara Dunia Ketiga merupak-an ilmu sosial yang dihasilkan oleh sarjana Barat dari hasil pembacaan terhadap masyarakat mereka.

Kuatnya pengaruh ilmu sosial Barat tersebut lebih disebabkan masalah internal intelektual-akademisi Indonesia sendiri, mereka telah terpusaskan dengan meniru apa yang berkembang di Barat, bahkan intelektual Indonesia bekerja keras untuk menerapkan teknik yang dipelajari dari buku-buku yang ditulis oleh sarjana Amerika dan Eropa dalam menjelaskan dan persoalan empiris atas masalah yang kebanyakan dirumuskan oleh ilmuwan Barat.

Hegemoni teori sosial barat sudah dirasakan sejak beberapa dekade lalu, dimana banyak teori barat yang kurang cocok dengan realitas masalah sosial di Asia. Selama itu pula hanya sedikit karya ilmuwan sosial yang berhasil menciptakan mahzab pemikiran ilmu sosial yang dinasionalisasi, dilokalkan sesuai dengan ciri khas negara-negara di Asia. Dominasi teori barat jelas terlihat, hal tersebut terjadi karena tingginya derajat yang disematkan pada teori, sehingga mengukuahkan teori barat baik klasik maupun kontemporer sebagai pusat perdebatan teoretis.

Akibat dari dominasi tersebut muncul ketergantungan dari negarane-gara di Asia terhadap perspektif teori sosial barat. Kebergantungan intelektual dapat dilihat baik dalam struktur kebergantungan akademis maupun dari relevansi ide-ide yang berlatar asing. Kebergantungan akademis dapat diukur dari ketersediaan relative dana dunia pertama untuk riset, prestise yang dilekatkan pada publikasi jurnal Amerika dan Inggris, kualitas tinggi pendidikan universitas barat dan banyak indicator lainnya.


C. Persoalan Ilmu Sosial dalam Perkembangannya di Indonesia

Persoalan pelik dalam perkembangan ilmu sosial di Indonesia dimulai dari ketidakmapuan dan ketidakpercayaan ilmuwan, akademisi terhadap pemikiran orisinal yang bersumber dari masyarakat. Ketidakpercayaan ini menjadi penyakit yang mengerogoti ilmuwan, karena tanpa sadar memaksakan peneliti untuk menggunakan, menduplikasi teori-teori barat yang dianggap sebagai pusatnya ilmu.

Beberapa masalah kemudian dimunculkan untuk melihat persoalan yang muncul dalam perkembangan ilmu sosial. Persoalan perkembangan ilmu sosial diadaptasi dari pemikiran Syed Farid Alatas sebagai berikut:

1. Ada bias eurosentris sehingga ide, model, pilihan masalah, metodologi, teknik bahkan prioritas riset cenderung semata-mata berasal dari Amerika, Inggris, Perancis dan Jerman.
2. Ada pengabaian umum terhadap tradisi filsafat dan sastra lokal.

4. Mimesis (peniruan) terlihat dalam pengadopsian yang tidak kritis terhadap model ilmu sosial barat.

5. Diskursus eropa mengenai masyarakat non barat cenderung mengarah pada konstruksi esensialis yang mengkonfirmasi bahwa dirinya adalah kebalikan dari eropa.

6. Tidaknya sudut pandang minoritas

7. Adanya dominasi intelektual negara dunia ketiga oleh kekuatan ilmu sosial eropa.

8. Telah ilmu sosial dunia ketiga dianggap tidak penting sebagian karena wataknya yang polemik dan retorik plus konseptualisasi yang tidak memadai.


D. Orientalisme: Pandangan Barat terhadap Timur

Diskursus yang berkembang di barat menempatkan timur sebagai bagian dari obyek yang menarik untuk dikaji. Barat kemudian mulai berpikir untuk mengkaji kebudayaan timur melalui sebuah ilmu yang kemudian dikenal sebagai orientalisme yaitu ilmu yang mempelajari tentang ke’timuran’.

Kata timur sendiri digunakan untuk merujuk asia baik secara geografis, moral maupun budaya, dengan kata lain orang barat memandang timur secara berbeda bahwa berkebalikan. Kondisi ini jugalah yang mendorong orang ‘timur’ untuk melihat pula barat secara berbeda.

“Secara langsung penduduk-penduduk pribumi (timur) memiliki perasaan naluriah bahwa pihak-pihak asing yang berurusan dengan mereka tidak disokong oleh kekuatan, kewenangan, simpati dan dukungan yang penuh dan ikhlas dari negara yang mengirim mereka. Penduduk-penduduk ini merasa kehilangan semua sense of order-nya yang menjadi basis peradaban mereka”

Konteks Itulah yang memunculkan orientalisme sebagai suatu kekuatan budaya yang secara halus menghgemoni timur. Identitas barat atas dunia timur tersebut bukan sekedar dari usaha barat sendiri, melainkan juga dari serangkaian “manipulasi cerdas” yang diterapkan oleh barat untuk
mengidentifikasi timur

Permasalahan kemudian timbul ketika timur sudah diperepraksakan oleh barat dan relasi pun timbul secara bersamaan, dimana disatui sisi timur pun merasa akhirnya benar-benar menjadi orang timur. Karena diperoleh dari kekuatan-kekuatan barat, maka pengetahuan tentang timur pada akhirnya benar-benar menciptakan "orang timur". Menurut Cromer dan Balfour, orang timur dilukiskan sebagai orang yang diadili/terdakwa, orang yang dikaji dan dipaparkan, orang yang didiskiplinkan atau bahkan sebagai orang yang dillustrasikan. Intinya adalah bahwa dalam setiap kasus di atas, orang timur hampir selalu dikendalikan dan direpresentasikan oleh struktur-struktur yang mendominasinya.

Tampaknya 'ketimuran' itu tanpa sadar menjadi hambatan bagi pengembangan keilmuan di timur, sehingga sampai sekarang masih terjajah. Dengan kata lain orientalisme berhasil mengalahkan kultur ketimuran itu sendiri.

Bagi Said sendiri orientalisme pada hakikatnya tak lebih sebagai bentuk "legitimasi" atas superioritas kebudayaan barat terhadap inferioritas kebudayaan timur. Ada hegemoni cultural sebagai praktik tak berkesudahan yang terus berlangsung dalam wacana orientalisme.

Pada level strategi pengembangan ilmu-ilmu Sosial di Indonesia, menurut penulis nampaknya perlu dipertimbangkan untuk mengkombinasikan antara berbagai pemikiran cendekia-awan dielaborasi pada tingkat yang lebih real misalnya pada wilayah institusi pendidikan.

E. Tawaran Mengatasi Kemandegan Ilmu Sosial

Ilmu Sosial Profetik (ISP) dan kegiatan 'tarbiyah syiasah', yang disampaikan oleh al marhum Kutowijoyo dan Musthofa Masyhur, kiranya mampu memberikan gambaran bahwa tarbiyah memiliki makna dan urgensi yang sangat sendrat bagi proses transformasi masyarakat menuju masyarakat yang Islami. Kegiatan tarbiyah jika dikaitkan dengan konsep profetik kiranya dapat dirumuskan dengan proporsi sebagai berikut. Kegiatan tarbiyah adalah merupakan ikhtiar yang aksiomatik yang harus ada demi hadirnya ummat yang terbaik (kholo ummat). Kegiatan tarbiyah setidak-tidaknya harus mampu mengantarkan manusia secara individu dan ummat secara umum, agar mampu membangun instrumen untuk mengajak kebaikan (al mā'ruf, humanisme), memiliki kapasitas untuk mencegah terjadinya kejahatan( al mungkar, liberalis) serta mengkohahkan keimanan kepada Allah (keimanan, transcendental).

Kiranya perlu diketengahkan definisi tarbiyah secara etimologi memiliki arti Lihat, Abdurrahman An Nahlawi, Ushulut Tarbiyah Islamiyah wa Asal-ibha fil Baiti wal Madrasati wal Mujtama, Penerbit Dar Al Fikr Al-Mu'asyir, Ba'lrut Libanon, 1403. Dalam kamus bahasa Arab setidak-tidaknya dapat ditemukan tiga akar kata untuk istilah tarbiyah: (1) rabbī-yārbusi (bertambah dan berkembang), (2) rabiya-yarbusi (tumbuh dan berkembang), dan (3) rabbī-yarbusi (memperbaiki, mengurusi kepentingan, mengatur, menjaga atau merawat, dan memperhatikan).

Paralel dengan terminologi ‘tarbiyah’ konsep kunci yang juga menjadi isu sentral dalam aktivitas gerakan dakwah ‘tarbiyah’, adalah tentang "platform jamaah" yang komprehensif, yakni seruan kepada syumuliyyatul Islam (kembali kepada ajaran Islam yang utuh dan menyeluruh). Dalam konteks ini Islam diyakini sebagai suatu sistem yang lengkap, menyenluth seluruh segi kehidupan. Ia adalah negara dan tanah air, pemerintahan dan umat, ahklak dan kekuatan, kasih sayang dan keadilan, peradaban dan undang-undang, ilmu dan peradilan. Materi dan kekayaan alam, jihad dan dakwah, pasukan dan pemikiran, sebagaimana ia adalah aqidah yang lurus dan ibadah yang benar.

Seperti terefleksikan dalam ungkapan yang dikutip pada awal tulisan bab ini. Bahwa kegiatan "tarbiyah", dalam makna ideologis sebagaimana dipahami oleh Musthafa Masyhur, menempati posisi yang sangat sentral bagi eksistensi gerakan tarbiyah di Indonesia.

Kalangan aktivis gerakan Tarbiyah meyakini suatu konsep bahwa perubahan masyarakat dan politik itu dimulai dari ikhtiar untuk merekonstruksi kepribadian Muslim, melalui proses tarbiyah. Melalui proses tarbiyah diupayakan lahir kader-kader yang memiliki kapasitas kepribadian yang memiliki kualitas tertentu yang efektif sebagai bagian dari agent perubahan sosial (agency of changes), kemudian setelah itu melangkah pada tahap berikutnya yakni mengelola diri melalui dan di dalam organisasi—melalui partai politik, diteruskan dengan tahap selanjutnya dengan bekal tersebut kader gerakan tarbiyah agar dapat memberikan kontribusi yang spesifik pada setiap bidang dan tingkat aspek kehidupan bermasyarakat dan ber-
Ilmu Sosial Profetik


Dengan ilmu sosial profetik, akan dilakukan orientasi terhadap epistemologi, yaitu orientasi terhadap mode of thought dan mode of inquiry, bahwa sumber ilmu pengetahuan itu tidak hanya dari rasio dan empiris, tetapi juga dari wahyu. Dengan gagasan ilmu sosial profetik ilmuwan sosial Muslim tidak perlu terlalu khawatir yang berlebihan terhadap dominasi ilmu sosial Barat di dalam proses theory building. Islamisasi pengetahuan dengan proses pemimjanan dan sistesis ini tidak harus diartikan sebagai westernisasi Islam.

Dalam pencermatan penulis Kuntowijoyo, telah merintis melalui sebuah ikhtiar sebagaimana dapat disimak dalam analisis yang dilakukannya dengan melakukan kritik sekaligus penyempurnaan pada tipologi Santri, Abangan dan Priyayi yang dikonseptualisasikan oleh Clifford Geertz, berikut ini.

Diantara kritik dan sekaligus penyempurnaan dari konsep Geertz ini ialah dilakukan oleh Kuntowijoyo. Menurut Kuntowijoyo, pada saat ini (dekade delapan puluhan-sembilan puluhan) pengelompokan abangan-santri secara horisontal (berdasarkan pengamalan keagamaan) dan priyayi-wong cilik (berdasarkan stratifikasi sosial) telah mengalami perubahan karena adanya konvergensi sosial. Terjadi mobilitas sosial dari wong cilik ke atas, dan
sebaliknya priyai ke bawah. Sementara itu golongan Santri dan Abangan sudah membuka diri sehingga terjadi proses saling mengisi. Akibatnya, batas-batas kultural diantara mereka sulit dikenali lagi.

Sungguhpun demikian secara sociologis, kehidupan keagamaan, setiap pemeluk agama memiliki perangkat aturan dan pola perilaku sebagai pengatur tata hubungan komunitas kelompok tersebut. Untuk pemeluk agama Islam aturan nilainya bersumber pada Al Qur'an, Sunnah Rosulullah, atau sistem nilai lainnya yang diadaptasi tetapi tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah.

**Pendidikan Politik Profetik**

Setidaknya ada tiga tujuan pendidikan politik/tarbiyah siyasiyah, yang meliputi: kepribadian politik/political self/dzat siyasiyah, kesadaran politik/political mobilitation/wa'yu siyasi, dan partisipasi politik/political participipation/musyrakah siyasiyah.

Lebih lanjut dikatakan bahwa kepribadian siasah adalah sejumlah atensi individu atau warga terhadap dunia siasah. Kepribadian siasah ini mencakup dimensi informasi dan persepsi yang berkaitan dengan dunia siasah, sudut pandang (viewpoint), baik yang positif, negatif, ataupun neutral, termasuk di dalamnya kematanangan psikologis yang menjadi modal seorang untuk musah berkomunikasi. Kesadaran siasah merupakan refleksi dari pandangan yang menyeluruh terhadap fenomena dan gerak siasah. Di dalamnya terkandung pengetahuan, informasi, nilai-nilai, dan orientasi siasah yang membentuk kesadaran individu terhadap masyarakat dan problematika yang ada di dalamnya. Musyrakah siyasiyah atau partisipasi politik (political participation) merupakan proses yang dilakukan oleh warga untuk berperan di kehidupan siasah dalam masyarakat, sehingga ia memiliki peluang untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan dan tujuan siasah bersama.

Menurut Sayyid Salamah Al-Khamisi sebagai dipaparkan oleh Utsman Abdul Mu'izz Ruslan (2000: 47), "Kesadaran politik berarti pandangan yang integral terhadap segala yang dicakup oleh politik, berupa pengetahuan perpolitikan dengan segala tingkatannya yang memungkinkan seseorang untuk memahami berbagai persoalan politik di tengah masyarakatnya, menganalisisnya, menempatkan posisi diri darinya, serta mendorong diri untuk bergerak demi perubahan atau perkembangannya. Partisipasi politik adalah hasrat individu untuk mempunyai peran dalam kehidupan politik melalui keterlibatan administratif untuk menggunakan hak bersuara, melibatkan dirinya di berbagai organisasi, mendiskusikan berbagai persoalan politik dengan pihak lain, ikut serta melakukan berbagai aksi dan gerakan, bergabung dengan partai-partai atau organisasi-organisasi independen, atau ikut serta dalam kampanye penyadaran, memberikan pelayanan terhadap lingkungan dengan kemampuannya sendiri, dan sebagainya. Kepribadian politik adalah sekumpulan orientasi politik yang dapatkan oleh individu melalui proses sosialisasi politik. Ini mencakup tiga dimensi:

1. nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan dasar yang memiliki makna politis.
2. orientasi, sensitivitas, dan loyalitas
yang memiliki tujuan politis.
3. pengetahuan, informasi, dan kesepsi politik*.

Muatan-muatan utama yang senantiasa menjadi fokus tarbiyah siyasiah, meliputi tiga hal, yaitu:
1. Menyangkut masalah prinsip dan pokok-pokok pemikiran yang dapat membentuk wawasan siasah, baik secara langsung atau tidak langsung, termasuk di dalamnya tentang ideologi dan doktrin-doktrin siasah,
2. Berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai, misalnya tumbuhnya kepribadian, kesadaran, dan partisipasi siasah,

**Model Pendidikan Politik Islam**


Definisi di atas menjelaskan beberapa unsur yang ada dalam setiap proses *tarbiyah siyasiyah*, meliputi: kepribadian siasah, kesadaran siasah, partisipasi siasah, lembaga-lembaga siasah, budaya siasah, dan individu atau warga negara.

Karacteristik *tarbiyah siyasiyah Islamiah* yang paling khas adalah referensinya yang baku, yaitu: wahyu dan seluruh perjalanan sejarah Nabi Muhammad saw yang menurut Sayyid Qutb melalui empat tahap, yaitu: membentuk jama’ah, berhijrah ke Madinah, melakukan konsolidasi, tahap perjuangan bersenjata, sementara menurut Imaduddin Khalil, yaitu: penegakkan Islam dalam skup kemanusiaan, penegakkan Islam dalam skup daulah, dan penegakkan Islam dalam skup peradaban (catatan kaki Abu Ridha, 2002).

*Tarbiyah Siyasiyah Islamiyah* dilakukan agar setiap warga mampu, senang, dan aktif berpartisipasi dalam siasah terhadap bermacam persoalan masyarakat umum. Keterlibatan warga merupakan wujud dari berbagai bentuk partisipasi yang dapat merealisasikan prinsip-prinsip Islam dalam pemeringtahan dan urusan umat, baik yang berkaitan dengan urusan dalam negeri ataupun luar negeri. Keterlibatan tersebut merupakan refleksi utuh sebagaimana dikatakan Rosulullah saw: “Barang siapa yang tidak memperhatikan urusan kaum muslimin, maka tidaklah ia dari golongan mereka”

Dengan demikian *tarbiyah siyasiyah Islamiah* dapat berfungsi memberikan penerangan kepada warga negara terhadap berbagai persoalan nasional, regional, dan internasional, khususnya yang berkaitan dengan sikap politik *mawqif siyasi* kaum muslimin. Selain itu *tarbiyah siyasiyah Islamiah* juga berupaya menanamkan kesadaran teologis tentang pentingnya *jihad fi sabillillah*, agar setiap individu muslim mempersenjatai diri untuk mempertahankan Islam, mempertahankan hak-haknya sebagai warga negara, komitmen kepada kewajibannya, aktif dalam kegiatan siasah, dan berpartisipasi penuh dalam perubahan ke arah yang lebih baik.
Untuk mencapai sasaran *tarbiyah siyasiyah*, yakni kepribadian *siasah*, kesadaran *siasah*, dan partisipasi *siasah* diperlukan beberapa *uslub* (cara pendekatan), baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. *Uslub* yang bersifat langsung terwujud dalam bentuk popularisasi dan magang dalam bidang *siasah*. Sementara itu, yang tergolong *uslub* tidak langsung, misalnya melalui peniruan dan kegiatan yang bersifat akademik.

Sementara itu, sarana penggunaan *uslub* dalam merealisasikan tujuan dan sasaran pendidikan politik juga turut melibatkan sarana konvensional maupun non konvensional. Metode yang biasa digunakan tidak hanya terbatas pada indoktrinasi yang memuat langsung ideologi, dan doktrin *siasah*, tetapi juga mencakup metode tidak langsung, misalnya menggunakan sistem belajar dengan cara menanamkan pemahaman atau meniru, menyebarkan materi *siasah*, menyediakan praktek lapangan dan pelatihan *siasah* sebagai pembeakalan pengalaman individu dalam bidang *siasah* yang diharapkan dapat mengembangkan potensi kemampuan *siasah*nya. Adapun karakteristik Model Pendidikan Politik Islam menurut dimensi tujuan, metode, dan kurikulum cakupan adalah sebagai berikut.

**Tabel 1. Model Pendidikan Politik Islam**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Dimensi Tujuan</th>
<th>1. kesadaran politik diarahkan pada:</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>a) kesadaran terhadap berbagai situasi politik, persoalan nasional, regional, dan internasional khususnya yang berkaitan dengan sikap politik (<em>mauwif siyasi</em>) kaum muslimin.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>b) Kesadaran akan pentingnya <em>jihad fi sabitillah</em>, agar setiap individu muslim mempersenjatai diri untuk mempertahankan Islam, mempertahankan hak-haknya sebagai warga negara, dan komitmen kepada kewajibannya,</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1. kepribadian politik akan terbentuknya mentalitas yang kritis dan mampu melakukan dialog konstruktif bukan tumbuhnya loyalitas individu pada penguasa.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2. partisipasi politik, yakni berpartisipasi aktif dan penuh dalam kehidupan politik masyarakat khususnya dan kehidupan sosial pada umumnya untuk perubahan ke arah yang lebih baik.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| Dimensi Metode | Magang, menirukan, pengajaran politik secara langsung, sarana penerapan dan praktek politik secara nyata yang dilakukan oleh keluarga, sekolah, lembaga-lembaga formal dan nonformal yang tidak terbatas pada tahapan usia/ masa studi serta kelompok masyarakat tertentu, dan merupakan proses berkesinambungan sepanjang hayat. |

| Dimensi Kurikulum Cakupan | 1. wawasan politik (posisi partai menyuguhkan informasi *siasah*, ekonomi, masalah sosial, gagasan, kebijakan, serta ideologi partai) *jihad fi sabitillah* |

Ada tiga tahapan interaksi politik gerakan Islam sebagai bagian dari manifestasi pendidikan politik yang dilaksanakan meliputi:

1. Tahap Pertama: Penguasaan Ilmu Politik (al-’ilm as-siyasi)
   Penguasaan ilmu politik dibutuhkan untuk menentukan keshalihan langkah-langkah yang diambil saat terdapat dorongan dan respon politik dari dalam maupun dari luar, yang terdiri dari:
   a. Muthola’ah siyasiyah (kritik atas literatur politik), meliputi: kajian bibliotik, bertemu dengan narasumber, pengamatan terhadap dinamika politik lokal, nasional, maupun internasional.
   b. Munawarah siyasiyah (dialog politik) dengan beragam aliran politik yang ada, peta dan rambu yang jelas, baik untuk lapangan konsepsional maupun operasional.
   c. Mutaba’ah siyasiyah (pelaksanaan evaluasi) terhadap seluruh langkah yang telah diambil, sehingga akan diketahui seluruh ruang lingkup politik telah dipahami dengan baik.

2. Tahap Kedua: Melakukan Aksi Penyadaran (Tan’iyyah As-Siyasiyah)
   Langkah tersebut ditempuh dengan menumbuhkan solidaritas internal para kader, baik yang terjun pada lapangan politik atau mereka yang mendukung dari luar serta diikuti dengan upaya penumbuhan lembaga-lembaga politik internal sebagai wahana tadribat (latihan) amal aktif yang disiapkan terjun dalam kancah politik. Dalam tahap ini diikuti pula dengan upaya melakukan beberapa aksi politik, seperti: penyebaran teori politik Islam, aksi-aksi politik (al-munawarah as-siyasi) dalam skala lokal, propaganda politik (ad-diyyan as-siyasi), pembentukan organisasi politik (at-tanzim as-siyasi), dan penetrasi politik (al-ikhhtiroq as-siyasi).

3. Tahap Ketiga: Partisipasi Politik (al-musyarokah as-siyasi)
   Di awal dengan partisipasi sosial (musyarokah ijtima’iyah) dalam bentuk keterlibatan aktif dalam upaya pengokohan dan penyehatan kondisi masyarakat dalam segala aspeknya, ruhiyah, fikriyah, jasadiyah, dan malihah. Dari hal tersebut diharapkan akan muncul pribadi-pribadi yang dikenal dan mengakar pada masyarakat, selanjutnya akan terbentuk dukungan masyarakat dan program-program yang membumi serta bermanfaat bagi masyarakat. Dengan basis dukungan masyarakat yang kokoh, maka langkah berikutnya diharapkan akan menjadi mudah. Pembentukan institusi politik akan memiliki dukungan publik yang memadai, begitu pula ketika memasuki arena Pemilu (al-intikhabiyah), memasuki parlemen, maupun pemeringtahan.

Tarbiyah islamiyah yang dilaksanakan oleh gerakan dakwah pada dasarnya diarahkan pula sebagai satu kesatuan upaya tarbiyah siyasiyah dalam rangka pembentukan kesadaran politik (takwinul wa’yu siyasi) kader tarbiyah. Titik tekannya pada upaya membangun kekuatan kader dari sisi pemikiran/fikriyah, kekuatan mahnawiyyah (ruhiyah), serta kekuatan operasional agar kader memiliki kesadaran terhadap problematika umat, pembentukan umat, dan penegakkan agama Islam. Metode yang diaplikasi-
sikan sama halnya dengan metode yang direalisasikan pada tarbiyah islamiyah, yakni: melalui ceramah dan diskusi dengan sarana liqo’ tarbawi-yah/haalqoh.

Sementara itu kurikulum cakupannya pada dasarnya melekat pada kurikulum tarbiyah islamiyah yang bersifat integral dan komprehensif. Dalam rangka pencapaian tujuan di atas menurut analisis peneliti terutama akan bersinggungan dengan pokok materi, yang meliputi: Ma’rifatul Islam, Qadhiyya Ad-da’wah, Al-Haq Wa Al-Bathil, Takwinul Ummah, dan Fiqh Ad-Da’wa.

Pokok materi Ma’rifatul Islam terutama ditekankan pada sub pokok materi syumuliyatul Islam (kesempurnaan Islam), minhajul hayah (pedoman hidup), thab’ih dini ilil Islam (tabiat agama Islam), Al-Amal Al-Islami (aktivitas Islami) yang mengandung kisikisi materi mengenai jihadi atau amar ma’ruf nahi mungkar dan dakwah sebagai penyokong/penguat kesempurnaan minhaj, politik sebagai salah satu unsur pelengkap tatkala menjadikan Islam sebagai pedoman hidup, agama da’wah dan ibadah merupakan unsur yang membentuk Insan politik, sekali lagi insan ibadah, sebagai salah satu tabiat agama Islam, maupun dakwah dan tarbiyah serta harakah dan jihadi sebagai manifestasi dari amal Islami.

Pokok materi qadhiyya ad-da’wah (problematika dakwah) menyentuh sub pokok materi ahwaal al muslimin al-yaum (kondisi umat Islam saat ini), amraadhu al-ummah fil ad-da’wah (penyakit umat dalam dakwah), dan qadhhiyyah al-ummah (masalah umat) memuat kisikisi materi tentang dakwah sebagai salah satu kelemahan kaum muslimin yang berakibat pada kondisi kaum muslimin saat ini, penyakit-penyakit umat yang berpangkal pada faktor infraidiyah (individual) yang perlu diatasi, ilmu pengetahuan, pembinaan (tarbiyah), dan jihad sebagai jalan keluar dari permasalahan umat Islam.

Selanjutnya pokok materi al-haq wa al-bathil menitikberatkan pada sub pokok materi al-istiqamaamah (konsisten) dan hizbullah (partai Allah: golongan orang beriman) memuat kisikisi materi yang menekankan konsistensi terhadap manhaj Allah (Al-Islam) dan menyebutkan bahwa salah satu akhlak dasar golongan orang beriman adalah berjihad di jalan Allah. Pada pokok materi takwin al ummah (pembentukan umat) kurikulum cakupan pendidikan politiknya terutama ditekankan pada sub pokok materi mengenai takwin al ummah (pembentuk umat), al-inqilaab al-Islami (perubahan Islam), ta’liiful qulub (kesetian hati), asbaab at-taffaruq wa’ilajjuhu (sebab-sebab perpecahan dan solusinya), al-ukuwah al-islimiyah (persaudaraan Islam).

Sub pokok materi di atas pada dasarnya menitikberatkan tentang amar ma’ruf nahi mungkar sebagai landasan dalam rangka pembentukan umat Islam dan bidang politik merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perwujudan inqilab Islam/perubahan total secara islam, serta kesetuan hati dalam rangka jihadi fi sabillah.

Sub pokok materi fiqh ad-da’wah (fiqh dakwah) meliputi: fadhha’iil ad-da’wah (keutamaan berdakwah), ma’na ad-da’wah (makna dakwah), fiqh ad-da’wah (fiqh dakwah), asaas amaliyah at-takwiiin (dasar-dasar kegiatan pembinaan), anashir ad-da’wah

**Simpulan**

Dari pemaparan di atas tentang urgensi hadirnya diskursus alternatif Ilmu-Ilmu Sosial di Asia lebih khusus lagi Indonesia, yang didalamnya memberikan peluang untuk terjadinya proses indigenousasi Ilmu-Ilmu Sosial, Kiraunya dapat diberikan penegasan bahwa kehidupan politik di Indonesia pasca reformasi politik tahun 1998, dan lebih khusus lagi para aktivis mahasiswa yang dimasa mendatang akan menjadi penerus perjuangan perlu sekali mendapatkan suatu jenis *pendidikan politik profetik*. Bukan sekedar pendidikan politik konvensional yang sudah terbukti tidak memiliki kemampuan untuk melahirkan kader ummat yang visioner. Bangsa Indonesia sangat merindukan hadirnya suatu gelombang generasi pemimpin bangsa yang visioner profetik, suatu visi kenegaraan, keummatan, kemanusiaan yang dibingkai oleh nilai-nilai yang bersumber dari wahyu Tuhan.

Pendidikan politik memiliki urgensi yang tinggi untuk hadirnya suatu generasi yang memiliki kompetensi agar dapat berpartisipasi dalam kehidupan politik suatu ummat (negara). Melalui aktivitas pendidikan politik suatu generasi ummat akan mendapatkan transmisi nilai-nilai, ideologi, sistem politik (yang dicita-cikatan) sebagaimana telah disepakati bersama oleh masyarakat yang bersangkutan.

Namun dalam kenyataannya tidak semua model pendidikan politik yang sekarang dipraktekan telah mampu menghadirkan generasi bangsa yang memiliki kemampuan untuk ikut berpartisipasi dalam rangka menyelasaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa tersebut. Mempertimbangkan kondisi tersebut kira nya perlu dikembangkan suatu model pendidikan politik yang memberikan kemungkinan untuk lahirnya kader kader umat-bangsa yang mampu berpartisipasi dalam rangka memberikan solusi pada berbagai persoalan ummat-bangsa, seperti misalnya persoalan moralitas, krisis kepercayaan, konflik horosental dan vertikal, perosoalan korupsi, menurunnya harkat dan martabat bangsa, kedaulatan bangsa.

Ikhtiar dan kerja intelektual sangat mendesak untuk dilakukan dalam rangka menghasilkan suatu model pendidikan politik, yang memberikan peluang tersedianya jalan keluar untuk hadirnya suatu model generasi penerus ummat-bangsa yang memiliki sejumlah karakter yang dibutuhkan oleh ummat-bangsa Indonesia. Model pendidikan tersebut secara terminologi diberi nama pendidikan politik profetik.
Puisi WS Rendra

Aku bertanya, tetap pertanyaan-pertanyaanku membentuk meja-mesa kekasan yang macet, dan papan tulis-papan tulis, para pendidik yang terlepas dari persoalan kehidupan.

Kita harus berhenti membeli rumus-rumus asing, Diktat-diktat hanya boleh memberi metode, Tetapi kita sendiri mesti merumuskan keadaan, Kita mesti keluar ke jalan raya, Keluar ke desa-desa, Mencatat sendiri semua gejala, Dan menghayati persoalan yang nyata.


Daftar Referensi:

Abdurrahman An Nahawi,1403, Ushulat Tarbiyah Islamiyah wa Aqliyah fi Bani wal Madarasati wali Mautama, Lebanon: Dar Al-Fikr Al-Murasik.


Al Banna, Hasan, 2000, Risalah Perguruan Ijtid 2, Solosintermedia.


Berger, Peter, L, & Luckman, Thomas, 1990, Teori Sosial Atas Ke- nyataan, Jakarta: LP3ES.


Kuntowijoyo, 1986, Konvergeni Sosial dan Alternatif Gerakan Kultural.


